

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas, perusahaan *go public* diwajibkan mempublikasikan laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan diaudit oleh akuntan publik yang telah terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga

Keuangan (BAPEPAM-LK). Oleh karena itu, perusahaan tersebut harus mengeluarkan biaya atas audit laporan keuangan yang disebut dengan biaya audit (*fee audit*). DeAngelo (1981) menyatakan bahwa biaya audit merupakan pendapatan yang besarnya bervariasi karena tergantung dari beberapa faktor dalam penugasan audit seperti ukuran perusahaan klien, kompleksitas jasa audit yang dihadapi auditor, risiko audit yang dihadapi auditor dari klien serta nama Kantor Akuntan Publik yang melakukan jasa audit.

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menerbitkan Surat Keputusan No. KEP.024/IAPI/VII/2008 pada tanggal 2 Juli 2008 tentang Kebijakan Penentuan *Fee Audit*, dalam lampiran 1 dijelaskan bahwa panduan ini dikeluarkan sebagai panduan bagi seluruh Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia yang menjalankan praktik sebagai akuntan publik dalam menetapkan besaran imbalan yang wajar atas jasa profesional yang diberikannya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam menetapkan imbalan jasa yang wajar sesuai dengan martabat profesi akuntan publik dan dalam jumlah yang pantas untuk dapat memberikan jasa sesuai dengan tuntutan standar profesional akuntan publik yang berlaku. Hal ini

memungkinkan penetapan fee yang terlalu rendah atau terlalu tinggi atas jasa. Kondisi tersebut memberikan indikasi bahwa penetapan biaya audit dilakukan secara subyektif, artinya ditentukan oleh salah satu atau atas dasar kekuatan tawar menawar antara auditor dan klien dalam situasi persaingan sesama akuntan publik. Hal ini memungkinkan penetapan biaya audit yang terlalu rendah atau terlalu tinggi atas jasa yang diberikan karena tergantung kekuatan tawar menawar antara auditor dan klien (Suharli & Nurlaelah, 2008).

Penelitian yang dilakukan Wahab *et al.* (2011) mengenai pengaruh perusahaan yang memiliki koneksi politik dan tata kelola terhadap biaya audit pada 382 perusahaan non-keuangan di Malaysia untuk periode 2001 sampai 2003.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki koneksi politik membayar biaya audit yang lebih tinggi, sementara perusahaan dengan tata kelola yang lebih baik menuntut kualitas audit yang lebih tinggi menyebabkan biaya audit yang lebih tinggi.

Menurut Gomez dan Jomo (1999), perusahaan yang memiliki koneksi politik adalah perusahaan atau pemiliknya mempunyai hubungan yang dekat dengan pemerintah. Perusahaan yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah tersebut memiliki hubungan bisnis yang eksklusif dengan pemerintah dan mempunyai akses istimewa pada setiap kebijakan pemerintah. Menurut Yoshihara (1988), perusahaan yang memiliki koneksi politik sering menggunakan pengaruhnya untuk mendapatkan akses yang lebih mudah untuk memperoleh pinjaman lunak. Pinjaman lunak ini dapat diperoleh dari bank pemerintah atau badan pengembangan daerah dan juga untuk mendapatkan tunjangan pensiun.

Pinjaman lunak tersebut dapat digunakan perusahaan untuk mengatasi krisis yang sedang terjadi sehingga perusahaan yang mempunyai koneksi politik kemungkinan mengalami kegagalan yang lebih besar dibanding perusahaan lain. Kemungkinan mengalami kegagalan yang lebih besar ini menyebabkan risiko audit menjadi lebih tinggi sehingga biaya audit juga mengalami kenaikan (Johnson & Milton, 2003).

Terdapat tiga elemen penting yang akan mempengaruhi tingkat efektivitas dewan komisari dalam pelaksanaan tata kelola, yaitu independensi, kompetensi, dan komitmen. Independensi diharapkan timbul dengan keberadaan komisaris independen. Kompetensi tercipta dengan adanya komite-komite yang dibentuk dewan komisaris, terutama komite audit. Keberadaan komisaris independen dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih obyektif dan independen, dan juga untuk menjaga fairness serta mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas, bahkan kepentingan para stakeholder lainnya (Boediono, 2005). Menurut Sharma (2003), eksternal auditor dan keberadaan dewan independen dalam pelaksanaan tata kelola akan menjadikan pengendalian internal lebih kuat dan risiko salah saji laporan keuangan yang lebih rendah. Pengendalian internal yang baik akan menyebabkan eksternal auditor mengurangi ruang lingkup pemeriksaan audit, yang pada akhirnya akan mempengaruhi proses penentuan biaya audit.

Auditor internal perusahaan dan komite audit perusahaan merupakan salah satu bagian vital dalam pembuatan laporan keuangan. Pihak-pihak tersebut

seharusnya memiliki pemahaman yang sama tentang peranan masing-masing unit yang dijalankan sehingga pelaksanaan tata kelola dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dari sisi permintaan, kehadiran komite audit memiliki hubungan yang positif dengan biaya audit karena komite audit memastikan bahwa lama proses audit tidak akan dikurangi sampai pada tingkat kualitas audit yang diinginkan (Cadbury Committee, 1992). Dari sisi penawaran, keterlibatan komite audit dalam memperkuat pengendalian internal yang menuntun auditor eksternal mengurangi penilaian dari risiko pengendalian, menghasilkan uji substantif yang lebih sedikit, dan biaya audit yang lebih rendah (Collier & Gregory, 1996).

Oleh karena pentingnya koneksi politik dan penerapan tata kelola perusahaan mempengaruhi terhadap biaya audit, maka penulis tertarik untuk meneliti penelitian ini dengan topik: **“Analisis Pengaruh Koneksi Politik dan Tata Kelola terhadap Biaya Audit pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Malaysia pada Tahun 2009-2013”**.

## 1.2 Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dengan variabel kontrol ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, anak perusahaan, anak perusahaan asing, aset lancar, *return on assets*, kerugian, likuiditas, solvabilitas, jenis industri, jenis auditor, tahun tutup buku dan penggantian auditor, sebagai berikut:

1. Apakah koneksi politik berpengaruh signifikan positif terhadap biaya audit?
2. Apakah tata kelola berpengaruh signifikan positif terhadap biaya audit?



### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan permasalahan di atas, tujuan penelitian ini dengan variabel kontrol ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, anak perusahaan, anak perusahaan asing, aset lancar, *return on assets*, kerugian, likuiditas, solvabilitas, jenis industri, jenis auditor, tahun tutup buku dan penggantian auditor adalah:

1. Untuk mengetahui apakah koneksi politik berpengaruh terhadap biaya audit.
2. Untuk mengetahui apakah tata kelola berpengaruh terhadap biaya audit.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi perusahaan  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan agar dapat digunakan sebagai pedoman dan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan biaya audit perusahaan dengan pihak auditor.
2. Bagi investor  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi investor agar dapat mengetahui apa saja yang dapat mempengaruhi penentuan biaya audit perusahaan sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang lebih menguntungkan.

3. Bagi kantor audit

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi auditor agar dapat digunakan sebagai pedoman dan bahan pertimbangan dalam menentukan biaya audit yang harus diterima dari klien.

4. Bagi peneliti berikutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti berikutnya yang dapat digunakan sebagai bahan pedoman, pertimbangan dan referensi dalam penelitian berikutnya, khususnya yang akan meneliti mengenai koneksi politik dan tata kelola yang mempengaruhi biaya audit pada perusahaan.

#### 1.4 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memberikan uraian secara umum mengenai isi dan pembahasan dari masing-masing bab dalam penulisan metodologi penelitian ini, yang terdiri dari lima bab yaitu:

##### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, tujuan, dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan dari penyusunan metodologi penelitian ini.

##### BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Bab ini berisi penjelasan mengenai model penelitian sebelumnya, definisi variabel dependen dan variabel independen, model penelitian serta perumusan hipotesis.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai rancangan penelitian, objek penelitian, definisi variabel operasional, teknik pengumpulan data yang digunakan, dan metode analisis data.

### BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai hasil dari pengujian data, analisis statistik deskriptif, dan penjelasan atas hasil-hasil yang diperoleh dari hipotesis yang diuji.

### BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang diperoleh peneliti dari hasil pembahasan dari bab-bab sebelumnya dan keterbatasan dari penelitian ini serta rekomendasi dan saran yang dapat diberikan oleh penulis mengenai permasalahan yang diteliti yang diharapkan dapat berguna bagi penelitian selanjutnya.